

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Amin, M. (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Economics Bosowa Journal*, 88-101.
- Arini, T. D. (2017). Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran. *JOM Fekon*, 236-250.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Biantoro, S. Y. (2019). Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran OPD Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Dendi, V. (2017). Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran. *JOM Fekon*, 1741-1755.
- Fajri, A. (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran. *Menara Ilmu*, 1-9.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haryoto, A. (2020). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-18.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Novita, A. (2021). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif, dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset*, 1-20.

- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Periansya, Sopiyan A. R., & Tri Ajeng Pratiwi. (2020). *The Effectiveness Budget Control Government of Ogan Ilir Regency: The Impact on Supervision and Competence*. *Finance, Accounting and Business Analysis*, 2(1), 58–64.
- Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. (2020). Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor 191/PW07/6/2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.
- Priyastama, R. (2020). *The Book of SPSS, Pengolahan dan Analisis Data*. Yogyakarta: Start Up.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS: Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2011). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Indonesia.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 285/PMK 02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indonesia.
- Sumarsono, Sonny. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Saputra, G., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran pada OPD di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 373-382.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Walikota Palembang. (2020). Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 96 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah kota Palembang. Indonesia.
- Widjaja, G. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winata, D. K. (2021,68). *KPK Minta Inspektorat Daerah Perkuat Pengawasan Anggaran*. Retrieved 5/10/2022, from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/410319/kpk-minta-inspektorat-daerah-perkuat-pengawasan-anggaran>.